

**ANALISIS DAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2013-2016**

DWINOVIANI

STIE Putra Bangsa Kebumen

[dwinoviani729@gmail.com](mailto:dwinoviani729@gmail.com)

*Abstract: The purpose of this research is to know the budget analysis and realization of Kebumen district in the year of 2013-2016. This research is a descriptive research. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The results of the study indicate that the compilation of the budget is in accordance with the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 concerning Guidelines on Financial Management area, while the report on the realization of district revenue budgets has been increased and decreased from 2013-2016 that has increased in 2015 that is 101.41% and decreased in 2016 which is 92.39%. The budget realization report from 2013-2016 has decreased. Report on the realization of transfer budget from 2013-2016 has been increased and decreased. Report on the realization of budget expenditure for 2013-2016 does not increase or decrease.*

*Keywords: budgeting, revenue, spending, transfers, financing expenditures*

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi ini, Negara Indonesia sebagai Negara berkembang sedang mengalami permasalahan baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintahan sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dalam era globalisasi ini. Pemerintahan yang baik (*good goverment*) adalah pemerintahan yang mampu mengelola administrasi publik sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good goverment*) pemerintah kabupaten kebumen dituntut untuk mewujudkan admisnistrasi publik yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga beban tugas dan tanggung jawab dirasakan semakin berat. Untuk keberlangsungan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good goverment*) maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Namun pada kenyataannya yang terkutip pada website Badan Pengelolaan Kabupaten Kebumen dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yaitu tahun dimana dimulainya DPPKAD diubah menjadi BPKAD bahwa berdasarkan polling yang terdiri dari 66 responden menunjukkan bahwa kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu cukup, belum menunjukkan baik ataupun sangat baik dan itu tentu berpengaruh pada penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Selain itu juga masih sedikitnya responden yang ikut serta dalam polling tersebut. Kurangnya transparansi mengenai penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran juga menjadi indikator besarnya potensi terjadinya korupsi dalam proses pengelolaannya, sehingga masih dipertanyakan apakah penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran sudah sesuai seperti yang dianggarkan atau belum dan apakah sudah tepat waktu seperti yang

direncanakan dalam anggaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di nilai bahwa penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada pemerintahan kabupaten kebumen belum baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis dan Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu:

Bagaimana analisis dan realisasi anggaran Kabupaten Kebumen tahun 2013-2016?

### **Batasan Masalah**

Sesuai dengan kebutuhan penulis dan juga keterbatasan waktu dalam penelitian ini, batasan masalah pada penelitian ini adalah data penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui anggaran dan realisasi anggaran Kabupaten Kebumen tahun 2013-2016.

### **Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkan yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

1.1 Diharapkan dapat menambah informasi tentang penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran.

1.2 Dapat menambah pengembangan keilmuan dibidang akuntansi pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

2.1 Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian dapat menjadi referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPKAD Kabupaten Kebumen.

## 2.2 Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu, pengetahuan, informasi dan memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPKAD Kabupaten Kebumen.

## 2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi tentang penelitian penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran di perpustakaan STIE Putra Bangsa.

## 2.4 Bagi BPKAD Kabupaten Kebumen

Dapat dijadikan sebagai saran atau masukan mengenai penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada tahun berikutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

### **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pengertian APBD dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah.

### **Tahap Penyusunan APBD**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah, tahap penyusunan APBD secara garis besar adalah sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah.

## 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan. Untuk tujuan ini harus ditetapkan setidaknya dua aturan yang jelas:

- a. Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang diusulkan) terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi, meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan ditetapkan.
- b. Semua proposal harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait: Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

## 3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja.

## 4. Penyusunan rancangan perda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan TAPD digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan

rencana perda APBD. Rencana perda APBD ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.

#### 5. Penetapan APBD

- a. Penyampaian dan pembahasan rencana perda tentang APBD
- b. Evaluasi rencana perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- c. Penetapan tentang perda APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

PSAP 02 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

- 1 Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber ekonomi.
- 2 Menyediakan informasi anggaran secara menyeluruh.

Selain manfaat tersebut, adapun tujuan LRA yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

#### **Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Jurnal Basri (2013: 207) dalam PSAP 02 paragraf 9 menjelaskan bahwa dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana indentifikasi lainnya
2. Cakupan entitas pelaporan
3. Periode yang dicakup
4. Mata uang pelaporan
5. Satuan angka yang digunakan

Selanjutnya dalam PSAP 02 paragraf 14 dijelaskan bahwa laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer

4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan Pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selanjutnya dalam paragraf 15 dijelaskan bahwa pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara wajar.

### **Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

#### Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006</b>	<b>PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>PENDAPATAN</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah	4. Lain-lain PAD yang Sah

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 138 Bumirejo, Kebumen periode 2013-2016.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

### **Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:**

#### **Teknik Wawancara**

Teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak BPKAD mengenai penyusunan anggaran pada BPKAD.

#### **Teknik Dokumentasi**

Teknik atau studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti penyusunan anggaran.

### **Jenis Data**

#### **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. Data tersebut dapat diperoleh dari data keuangan serta laporan-laporan lain yang disajikan.

#### **Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa proses penyusunan anggaran dan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran pada BPKAD Kabupaten Kebumen.

### **Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian penulis. Adapun data-data yang diperoleh berupa proses penyusunan anggaran yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengetahui

laporan realisasi anggaran apakah sudah terealisasi dengan yang telah dianggarkan.

## **HASIL PENELITIAN**

Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dijalankan di tahun 2013-2016. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD kabupaten Kebumen yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun 2010-2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan tugas pemerintahannya. Tahapan penyusunan anggaran satuan kerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### **2. KUA dan PPAS**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RPAPB program dan kegiatan pada tahun yang berjalan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk di dalamnya belanja pegawai.

### 3. RKA-SKPD

KUA/PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya dibuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Dalam Surat Edaran Kepala Daerah memuat:

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKAD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

### Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibuat setiap tahun untuk mengetahui prosentase penyerapan dana. Realisasi anggaran pada BPKAD dapat dilihat pada tabel berikut dan lampiran

Tabel IV.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2013	1.482.907.637.000	1.440.919.451.375	41.988.185.625	97,17%
2014	1.711.964.781.000	1.721.419.216.694	9.454.435.694	100,55 %
2015	2.147.748.481.000	2.178.122.976.793	30.374.495.793	101,41 %
2016	2.505.886.181.000	2.315.193.502.331	190.692.678.669	92,39%

Prosentase Realisasi tahun 2013

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% = \frac{1.440.919.451.375}{1.482.907.637.000} \times 100\% = 97,17\%$$

Prosentase Realisasi tahun 2014

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% = \frac{1.721.419.216.694}{1.711.964.781.000} \times 100\% = 100,55\%$$

Prosentase Realisasi tahun 2015

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% = \frac{2.178.122.976.793}{2.147.748.481.000} \times 100\% = 101,41\%$$

Prosentase Realisasi tahun 2016

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% = \frac{2.315.193.502.331}{2.505.886.181.000} \times 100\% = 92,39\%$$

## PEMBAHASAN

Anggaran pada pemerintahan kabupaten Kebumen telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Seperti yang tertera pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPKD) Kabupaten Kebumen.

Pendapatan secara umum dari anggaran pendapatan yang telah ditargetkan pada tahun 2013 yaitu sebesar RP.1.482.907.637.000 pencapaian di Tahun Anggaran 2013 sebesar 97,17% dengan realisasi sebesar Rp.1.440.919.451.375 menggambarkan bahwa realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan yang tidak mencapai target

yang di anggarkan diantaranya yaitu dana perimbangan, dana penyesuaian, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan pada tahun 2014 dari anggaran pendapatan yang telah dianggarkan Rp.1.711.964.781.000 pencapaian di Tahun Anggaran 2014 sebesar 100,55% dengan realisasi sebesar Rp.1.721.419.216.694 menggambarkan bahwa pendapatan tahun 2014 mencapai target yang telah dianggarkan. Hal ini dikarenakan semua pendapatan mencapai target yang telah di anggarkan diantaranya yaitu dana perimbangan, dana penyesuaian, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan pada tahun 2015 dari anggaran pendapatan yang telah dianggarkan Rp.2.147.748.481.000 pencapaian di Tahun Anggaran 2015 sebesar 101,41% dengan realisasi sebesar Rp.2.178.122.976.793 menggambarkan bahwa pendapatan tahun 2015 mencapai target yang telah dianggarkan. Hal ini dikarenakan semua pendapatan mencapai target yang telah di anggarkan diantaranya yaitu dana perimbangan, dana lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan pada tahun 2016 dari anggaran pendapatan yang telah dianggarkan Rp.2.505.886.181.000 pencapaian di Tahun Anggaran 2016 sebesar 92,39% dengan realisasi sebesar Rp.2.315.193.502.331 menggambarkan bahwa pendapatan tahun 2016 tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan yang tidak mencapai target yang telah di anggarkan yaitu dana perimbangan.

## **KESIMPULAN**

1. Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum pada Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPKD).

2. Pelaksanaan penyusunan anggaran pada BPKAD Kabupaten Kebumen meliputi penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, hingga RKA-SKPD.
3. Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013-2016:

Tabel V.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2013	1.482.907.637.000	1.44.919.451.375	41.988.185.625	97,17%
2014	1.711.964.781.000	1.721.419.216.694	9.454.435.694	100,55%
2015	2.147.748.481.000	2.178.122.976.793	30.374.495.793	101,41%
2016	2.505.886.181.000	2.315.193.502.331	190.692.678.669	92,39%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2013-2016 bisa dikatakan baik karena sudah terealisasi di atas 90%.

Tabel V.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2013	114.386.348.000	111.919.584.386	2.466.763.614	97,84%
2014	129.057.547.000	119.988.919.475	9.068.627.525	92,97%
2015	94.244.748.000	85.741.194.112	8.503.553.888	90,98%
2016	67.678.461.000	61.489.783.657	6.188.677.343	90,86%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2013-2016 bisa dikatakan baik karena sudah terealisasi di atas 90%.

Tabel V.3 Realisasi Anggaran Transfer Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2013	69.952.071.000	69.530.437.349	421.633.651	99,40%
2014	80.756.711.000	80.302.635.377	454.075.623	99,44%
2015	252.594.327.000	252.258.888.785	335.438.215	99,87%
2016	424.467.322.000	423.528.050.500	939.271.500	99,78%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran transfer pada tahun 2013-2016 bisa dikatakan baik karena sudah terealisasi di atas 90%.

Tabel V.4 Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2013	7.350.000.000	7.350.000.000	0	100%
2014	11.100.000.000	11.100.000.000	0	100%
2015	7.750.000.000	7.750.000.000	0	100%
2016	11.900.000.000	11.900.000.000	0	100%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013-2016 bisa dikatakan baik karena sudah terealisasi di atas 90%.

Jadi kesimpulan anggaran dan realisasi anggaran Kabupaten Kebumen 2013-2016 yaitu baik karena dapat diterima dan sudah terealisasi di atas 90%.

#### **SARAN**

1. BPKAD Kabupaten Kebumen sebaiknya lebih banyak mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pegawainya yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM namun juga dapat menghasilkan RKA-SKPD yang transparan, efektif dan efisien demi tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. BPKAD hendaknya mampu menyajikan Siklus Anggaran Daerah yang memadai dan memberikan informasi yang jelas terhadap penyusunan anggaran yang telah dilakukan.

3. Sebaiknya BPKAD meningkatkan pendapatan dari daerah seperti pajak dan kontribusi agar tidak bergantung pada dana transfer sehingga dapat mencapai realisasinya sesuai target.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nunuy Nur.2008.*Akuntansi Pemerintahan:Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*.Kencana Prenada Media Group.Jakarta.
- Deddi, *et al*.2007.*Akuntansi Pemerintahan*.Salemba Empat.Jakarta.
- Korompot, Riska, dan Poputra, Agus T.2015.Analisis Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.*Jurnal EMBA* 3(1): 841-848.
- Kuncoro, Haryo.2008.Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.*Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 1(2): 126-142.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 *tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja*.2014.
- Poerwanto, Hendra.Pengertian Definisi Manfaat Tujuan Anggaran.<https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran>.15 Desember 2017 (20:21).
- Rachmat.2010.*Akuntansi Pemerintahan*.Pustaka Setia.Bandung.
- Suganda, Muhamad.2015.Materi Diskusi Laporan Realisasi.<http://muhamadsuganda23.blogspot.co.id/2015/06/materi-diskusi-laporanrealisasi.html?m=1>.26 Desember 2017 (10:29).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.